



IKHTISAR HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

2024



IHP menjadi wujud komitmen Itjen Kemendagri dalam memastikan efektivitas pengawasan serta mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

- Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

PENGARAH

- Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

KONTRIBUTOR

- Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

PENYUSUN

- Bagian Analisis, Evaluasi, dan Informasi Hasil Pengawasan,
Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh
Salam Sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namu
Budaya, Salam Kebajikan.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan karunia-Nya, Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berperan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan serta penyusunan IHP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

IHP ini menyajikan perspektif yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui audit Kepatuhan, Audit Kinerja, Pengawasan Umum dan Teknis, serta Pengawasan Tematik pada Tahun 2024.

IHP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 memuat data analisis atas temuan strategis beserta rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi dasar dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Internal, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada seluruh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah.

Keberadaan IHP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, IHP ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas, serta dapat memberikan *insight* terhadap upaya perbaikan dan kemajuan serta memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Jakarta, 30 November 2025
Inspektur Jenderal,

S. M. Mahendra Jaya

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Penyusunan IHP	2
3. Ruang Lingkup	2
II. CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN 2024	3
1. Pengawasan pada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP.....	3
a. Hasil Audit Kepatuhan.....	3
b. Hasil Audit Kinerja.....	5
c. Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan dan Kinerja	6
d. Analisis dan Rekomendasi.....	8
2. Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemerintahan Daerah	9
a. Hasil Pengawasan Umum dan Teknis.....	11
b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis	11
c. Analisis dan Rekomendasi.....	14
3. Pengawasan Tematik pada Pemerintahan Daerah	15
a. Hasil Pengawasan Tematik.....	15
b. Tindak Lanjut Pengawasan Tematik	17
c. Analisis dan Rekomendasi.....	18
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	20
1. Kesimpulan	20
2. Rekomendasi	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja	6
Tabel 2: Hasil Pengawasan Umum dan Teknis	9
Tabel 3: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis	11
Tabel 4: Hasil Pengawasan Tematik	14
Tabel 5: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tematik	16

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja	7
Grafik 2: Temuan Aspek Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemerintahan Daerah	9
Grafik 3: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis	12
Grafik 4: Temuan Pengawasan Tematik pada Pemerintahan Daerah	15
Grafik 5: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tematik	17

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Gambaran Umum

Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sepanjang Tahun 2024 diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif, baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), maupun Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan melalui Audit Kepatuhan, Audit Kinerja, serta Pengawasan Umum dan Teknis, serta Tematik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengawasan.

2. Hasil Pengawasan pada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP

Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP sepanjang Tahun 2024 menghasilkan **568** rekomendasi dengan nilai temuan sebesar **Rp389,13 juta**. Dari jumlah tersebut, **Rp212,27 juta (54,5%)** telah disetorkan ke kas negara, sedangkan **Rp176,86 juta (45,5%)** masih dalam proses penyelesaian oleh satuan kerja terkait.

a. Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan mengidentifikasi kelemahan dominan pada aspek Belanja, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Administrasi Pemerintahan, serta Perjalanan Dinas. Temuan-temuan ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan administratif pada beberapa satuan kerja, terutama dalam penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta pemutakhiran data BMN.

b. Audit Kinerja

Audit Kinerja menyoroti permasalahan utama terkait efektivitas pencapaian program dan pengelolaan sumber daya, terutama pada efektivitas capaian target, pengembangan SDM, perencanaan dan regulasi, serta fungsi monitoring dan evaluasi internal. Temuan menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengukuran kinerja berbasis outcome, peningkatan integrasi antara perencanaan dan implementasi, serta penguatan kapasitas manajerial aparatur agar kinerja organisasi lebih efektif dan berorientasi hasil (*result-based performance*).

3. Hasil Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemerintah Daerah

Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024 telah melaksanakan pengawasan umum dan teknis terhadap 34 Pemerintah Provinsi, yang menghasilkan **561 temuan** dan **1.036 rekomendasi**. Sebagian besar temuan (**42,07%**) berkaitan dengan aspek Keuangan Daerah, yang mencerminkan masih lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD serta penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Dari total

1.036 rekomendasi, sebanyak **956 rekomendasi (92,3%)** telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Nilai temuan kerugian daerah sebesar **Rp34,81 miliar**, dan telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar **Rp1,44 miliar**, sehingga masih terdapat nilai sisa temuan sebesar **Rp33,36 miliar (95,9%)** yang belum terselesaikan, terutama pada Pemerintah Provinsi Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Temuan-temuan tersebut menegaskan perlunya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) daerah, peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan, serta pengawasan berkelanjutan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil audit, agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel dan efisien.

4. Hasil Pengawasan Tematik pada Pemerintah Daerah

Pengawasan tematik pada Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 19 Pemerintah Daerah, yang menghasilkan **158 temuan** dan **331 rekomendasi**. Fokus utama pengawasan meliputi Pelayanan Publik Manajemen Rumah Sakit Daerah, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Publik, Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah. Dari total **331 rekomendasi**, sebanyak **72 rekomendasi (22,2%)** telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses tindak lanjut. Nilai temuan yang diidentifikasi mencapai **Rp704,93 juta**, dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar **Rp174,73 juta (24,8%)**. Risiko finansial terbesar tercatat pada Provinsi Jambi dengan nilai temuan sebesar **Rp530,19 juta** yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, khususnya pada aspek kepatuhan keuangan, akuntabilitas layanan publik, serta penguatan pengendalian internal di sektor kesehatan daerah.

5. Analisis dan Rekomendasi Strategis

Hasil audit menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepatuhan dan tata kelola. Ketidakefektifan sistem pengendalian internal menyebabkan penurunan kinerja organisasi, sementara tata kelola yang lemah berdampak pada menurunnya disiplin dan kepatuhan aparatur terhadap aturan. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan pada Tahun 2024 telah mendorong peningkatan kesadaran dan komitmen terhadap akuntabilitas di sebagian besar satuan kerja dan pemerintah daerah. Namun demikian, disparitas tingkat kepatuhan dan efektivitas pengendalian antar daerah maupun antar unit kerja masih cukup tinggi, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan dan pengawasan yang lebih adaptif, berbasis risiko, dan berorientasi pada hasil.

6. Rekomendasi Utama

a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Mendorong penerapan *early warning system* dan mekanisme pemantauan berbasis risiko di seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah, guna mendeteksi secara dini potensi penyimpangan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

- b. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada daerah dengan nilai kerugian signifikan melalui koordinasi intensif antara Inspektorat Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta memperkuat mekanisme monitoring berbasis sistem (SIWASIAT dan SIPD).
- c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengawasan
Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, *coaching clinic* tematik, dan *mentoring* lintas wilayah untuk meningkatkan kemampuan analitis, manajerial, dan teknis auditor, sehingga hasil pengawasan semakin berkualitas dan berdampak.
- d. Integrasi Hasil Pengawasan dengan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah
Menjadikan hasil pengawasan sebagai indikator evaluasi kinerja kepala daerah, dengan menekankan pada aspek penyelesaian tindak lanjut, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan program strategis nasional.



Rakornas BINWAS Penyelenggaraan Pemda, 8 s.d. 10 Oktober 2025, di Hotel Pullman Jakarta.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Pusat Melakukan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Daerah. Tujuan Binwas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi, demi mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan daerah. Selain itu Binwas juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga integritas dan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 377 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri, ditegaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kemendagri sekaligus pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur bahwa pengawasan yang dilakukan oleh APIP dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, serta bentuk pengawasan lainnya untuk memberikan keyakinan memadai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Penyusunan IHP

- a. Menyajikan ringkasan komprehensif hasil pengawasan Tahun 2024.
- b. Memberikan gambaran temuan strategis, dan pola permasalahan secara nasional.
- c. Menjadi dasar rekomendasi kebijakan.

3. Ruang Lingkup

- a. Pengawasan pada Kemendagri dan BNPP
 - 1) Hasil Audit Kepatuhan
 - 2) Hasil Audit Kinerja

- 3) Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan dan Kinerja
 - 4) Analisis dan Rekomendasi
- b. Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemerintahan Daerah
 - 1) Hasil Pengawasan Umum dan Teknis
 - 2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis
 - 3) Analisis dan Rekomendasi
- c. Pengawasan Tematik pada Pemda
 - 1) Hasil Pengawasan Tematik
 - 2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tematik
 - 3) Analisis dan Rekomendasi

II. Capaian Kegiatan Pengawasan 2024



Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian memberi sambutan pada acara Rakornas BINWAS

1. Pengawasan pada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP

Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan dalam bentuk **Audit Kepatuhan** dan **Audit Kinerja** pada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP. Pelaksanaan kedua jenis audit tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mengukur efektivitas pencapaian kinerja sebagai dua dimensi utama tata kelola pemerintahan.



a. Hasil Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan mengungkap sejumlah kelemahan yang dominan pada aspek belanja, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengadaan barang/jasa, administrasi, serta perjalanan dinas. Secara keseluruhan, audit ini menghasilkan **469 rekomendasi**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Aspek Belanja (158 rekomendasi)** menunjukkan adanya kelemahan dalam kepatuhan terhadap regulasi keuangan, yang tercermin dari belanja pemeliharaan yang tidak sesuai ketentuan, terjadinya kelebihan pembayaran, penggunaan belanja yang tidak mengikuti standar, serta pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai peraturan. **Interpretasi:** kondisi ini menggambarkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi serta kurangnya pengendalian internal dalam pengelolaan belanja.
- 2) **Aspek Pengelolaan BMN (79 rekomendasi)** menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset negara, yang terlihat dari belanja pemeliharaan BMN yang tidak sesuai dengan hasil penelaahan Kementerian Keuangan, pemanfaatan BMN yang dilakukan di luar ketentuan, penatausahaan aset yang belum tertib, serta pengelolaan persediaan dan perlengkapan yang tidak mengikuti aturan. **Interpretasi:** kondisi ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola aset, terutama dalam aspek pencatatan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban.
- 3) **Aspek Pengadaan Barang/Jasa (50 rekomendasi)** menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses pengadaan, mulai dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, output jasa konsultasi bantuan teknis yang tidak tercapai, hingga belum diterapkannya prinsip-prinsip dasar pengadaan. **Interpretasi:** kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan.
- 4) **Aspek Administrasi (26 rekomendasi)** menunjukkan masih adanya ketidaktertiban dalam pengelolaan administrasi, yang terlihat dari pengelolaan administrasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang belum tertata dengan baik, perjalanan dinas luar negeri yang tidak disertai laporan hasil pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak tepat waktu, serta penatausahaan persediaan obat pada poliklinik yang belum tertib. **Interpretasi:** kondisi ini mencerminkan masih terdapat kekurangan dalam tata kelola administrasi dan pelaporan.
- 5) **Aspek Perjalanan Dinas (15 rekomendasi)** menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan, yang terlihat dari belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban serta realisasi belanja perjalanan yang melebihi standar yang telah ditetapkan. **Interpretasi:** kondisi ini mencerminkan lemahnya disiplin administratif dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- 6) **Aspek lainnya (141 rekomendasi)** menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak didukung perhitungan riil, kelemahan pengendalian internal, serta ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. **Interpretasi:** hal ini mencerminkan lemahnya fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian internal.



Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian memberikan Penghargaan pada Inspektur Daerah Berkinerja Terbaik

b. Hasil Audit Kinerja

Audit Kinerja menyoroti permasalahan pada efektivitas pencapaian target, pengembangan SDM, perencanaan regulasi, serta fungsi monitoring. Secara keseluruhan, terdapat 99 rekomendasi yang dihasilkan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Efektivitas pencapaian target (18 rekomendasi)**, menunjukkan bahwa beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak tercapai, target output kegiatan belum terpenuhi, dan pengukuran kinerja masih belum berbasis outcome. **Interpretasi:** kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas program dan kegiatan belum optimal dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
- 2) **Aspek pengembangan SDM dan kompetensi aparatur (17 rekomendasi)**, menunjukkan bahwa program pelatihan ASN belum disusun berdasarkan analisis kebutuhan, pelaksanaan diklat tidak terukur dampaknya, serta sistem pengembangan karier dan kompetensi aparatur masih lemah. **Interpretasi:** hal ini mencerminkan kurangnya komitmen dalam meningkatkan kompetensi SDM untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) **Aspek Perencanaan dan Regulasi (15 rekomendasi)**, menunjukkan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan evaluasi Ranperda APBD provinsi yang berdampak pada penetapan Perda APBD melampaui batas waktu yang ditetapkan. **Interpretasi:** kondisi ini mencerminkan kelemahan dalam pelaksanaan SOP internal terkait evaluasi Ranperda serta tidak dilaksanakannya mitigasi risiko secara memadai.
- 4) **Aspek Evaluasi dan Pengendalian (14 rekomendasi)**, menunjukkan bahwa fungsi pengendalian internal tidak dilaksanakan secara memadai dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan belum diselesaikan sebagaimana mestinya. **Interpretasi:** kondisi ini menegaskan tidak diterapkannya mitigasi risiko terhadap rencana kerja dan kegiatan.
- 5) **Aspek Administrasi Pemerintahan (13 rekomendasi)**, menunjukkan adanya keterlambatan dalam penyampaian dokumen laporan

pertanggungjawaban hasil kegiatan serta penatausahaan dokumen yang belum sesuai dengan SOP yang berlaku. **Interpretasi:** kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal dalam proses administrasi pemerintahan.

- 6) **Aspek Kerja Sama dan Koordinasi (12 rekomendasi)**, menunjukkan bahwa sejumlah perjanjian kerja sama tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain belum dilakukan. **Interpretasi:** kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarunit dan antar pemangku kepentingan.
- 7) **Aspek lainnya (10 rekomendasi)**, menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan belum dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, struktur organisasi belum selaras dengan kebutuhan tugas dan fungsi (Tusi), serta uraian Tusi masih belum jelas atau tumpang tindih. **Interpretasi:** hal ini mencerminkan kurangnya ketelitian serta lemahnya koordinasi dalam proses penyusunan regulasi.



Irjen Kemendagri, S.M. Mahendra Jaya memberikan Penghargaan pada Satker Kemendagri dan BNPP yang penyelesaian TLHP tahun 2005 s.d. 2024 Tuntas 100%

c. Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja

Dari hasil Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja yang telah dilaksanakan, tindak lanjut atas rekomendasi menunjukkan capaian sebagai berikut:

- 1) Terdapat **568 rekomendasi**, dengan 409 rekomendasi (72,01%) telah ditindaklanjuti atau dinyatakan selesai, sementara 159 rekomendasi (27,99%) masih belum ditindaklanjuti.



- 2) **Nilai temuan mencapai Rp389,13 juta**, dengan pengembalian ke kas negara sebesar Rp212,27 juta (54,55%), sehingga masih terdapat sisa temuan sebesar Rp176,85 juta (45,45%) yang belum diselesaikan.
- 3) Meskipun **72% rekomendasi telah ditindaklanjuti**, nilai pengembalian kerugian ke kas negara baru mencapai 54,55%, yang menunjukkan bahwa aspek keuangan masih memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan akuntabilitas satuan kerja.

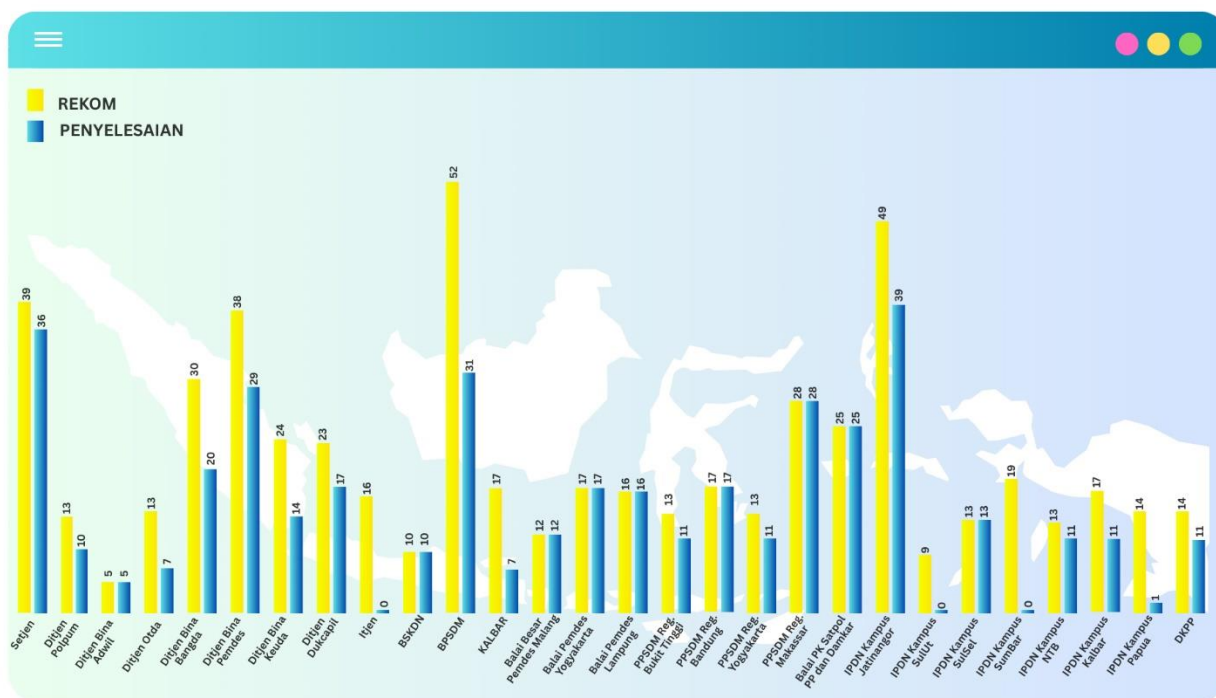
Tabel 1
Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja

No	Satker	Temuan Administrasi			Temuan Kerugian Negara		
		Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan (Rp)	Telah Disetor (Rp)	Sisa Temuan (Rp)
1	Setjen	38	36	2	37.748.000	37.748.000	0
2	Ditjen Polpum	13	10	3	0	0	0
3	Ditjen Bina Adwil	5	5	0	0	0	0
4	Ditjen Otda	13	7	6	14.062.500	14.062.500	0
5	Ditjen Bina Bangda	30	20	10	45.565.635	45.565.735	0
6	Ditjen Bina Pemdes	38	29	9	12.657.188	5.173.525	7.483.663
7	Ditjen Bina Keuda	24	14	10	1.067.400	1.067.400	0
8	Ditjen Dukcapil	23	17	6	0	0	0
9	Itjen	16	0	16	0	0	0
10	BSKDN	10	10	0	0	0	0
11	BPSDM	52	31	21	970.000	0	970.000
12	BNPP	17	7	10	21.121.000	10.255.000	10.866.000
13	Balai Besar Pemdes Malang	12	12	0	0	0	0
14	Balai Pemdes Yogyakarta	17	17	0	0	0	0
15	Balai Pemdes Lampung	16	16	0	8.264.700	8.264.700	0
16	PPSDM Reg. Bukit Tinggi	13	11	2	0	0	0
17	PPSDM Reg. Bandung	17	17	0	5.644.755	5.644.755	0
18	PPSDM Reg. Yogyakarta	13	11	2	0	0	0
19	PPSDM Reg. Makassar	28	28	0	26.867.000	26.867.000	0
20	Balai PK Satpol PP dan Damkar	25	25	0	32.345.384	32.345.384	0
21	IPDN Kampus Jatinangor	49	39	10	36.143.087	3.650.548	32.492.539
22	IPDN Kampus Sulut	9	0	9	445.000	0	445.000
23	IPDN Kampus Sulsel	13	13	0	21.634.334	21.634.334	0
24	IPDN Kampus Sumbar	19	0	19	3.676.900	0	3.676.900
25	IPDN Kampus NTB	13	11	2	13.251.450	0	13.251.450
26	IPDN Kampus Kalbar	17	11	6	0	0	0

27	IPDN Kampus Papua	14	1	13	107.672.435	0	107.672.435
28	DKPP	14	11	3	0	0	0
Total		568	409	159	389.136.767	212.278.780	176.857.987

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, 10 November 2025

Grafik 1
Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja



d. Analisis dan Rekomendasi

1) Analisis

Inspektorat Jenderal menemukan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain mencakup hal-hal berikut:



- a) **Audit Kepatuhan** menunjukkan adanya kelemahan dalam pertanggungjawaban belanja, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perjalanan dinas, serta ketertiban administrasi pada 17 satker, dengan nilai temuan sebesar **Rp382.387.768** dan sisa yang masih harus disetorkan ke kas negara sebesar **Rp221.027.028**.

- b) **Audit Kinerja** menegaskan adanya kelemahan dalam tata kelola dan manajerial, yang tercermin dari tidak tercapainya target indikator kinerja, lemahnya pengembangan kompetensi aparatur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum efektif.
 - c) **Struktural**: Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada beberapa satker belum berjalan efektif, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 - d) **Kapasitas SDM**: Kompetensi aparatur, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, serta perencanaan berbasis kinerja, masih terbatas sehingga memengaruhi kualitas tata kelola dan pengambilan keputusan.
 - e) **Budaya Organisasi**: Disiplin kepatuhan terhadap regulasi masih rendah, terlihat dari berulangnya temuan terkait administrasi, perjalanan dinas, dan pembayaran tunjangan kinerja.
- 2) Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Pimpinan Satker agar melakukan:
- a) **Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)** meliputi penerapan *early warning system* serta mekanisme pemantauan berbasis risiko pada seluruh satuan kerja untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
 - b) **Peningkatan Kapasitas SDM** dilakukan dengan mendorong satuan kerja yang berulang kali memiliki temuan kepatuhan untuk menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi di bidang keuangan, pengadaan, dan perencanaan, serta melaksanakan *coaching clinic* guna memperkuat kemampuan aparatur dalam memenuhi standar tata kelola.
 - c) **Penegakan Disiplin Kepatuhan** dilakukan melalui penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten kepada satuan kerja yang menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi maupun kepada yang lalai menyelesaikannya.



2. Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemerintahan Daerah

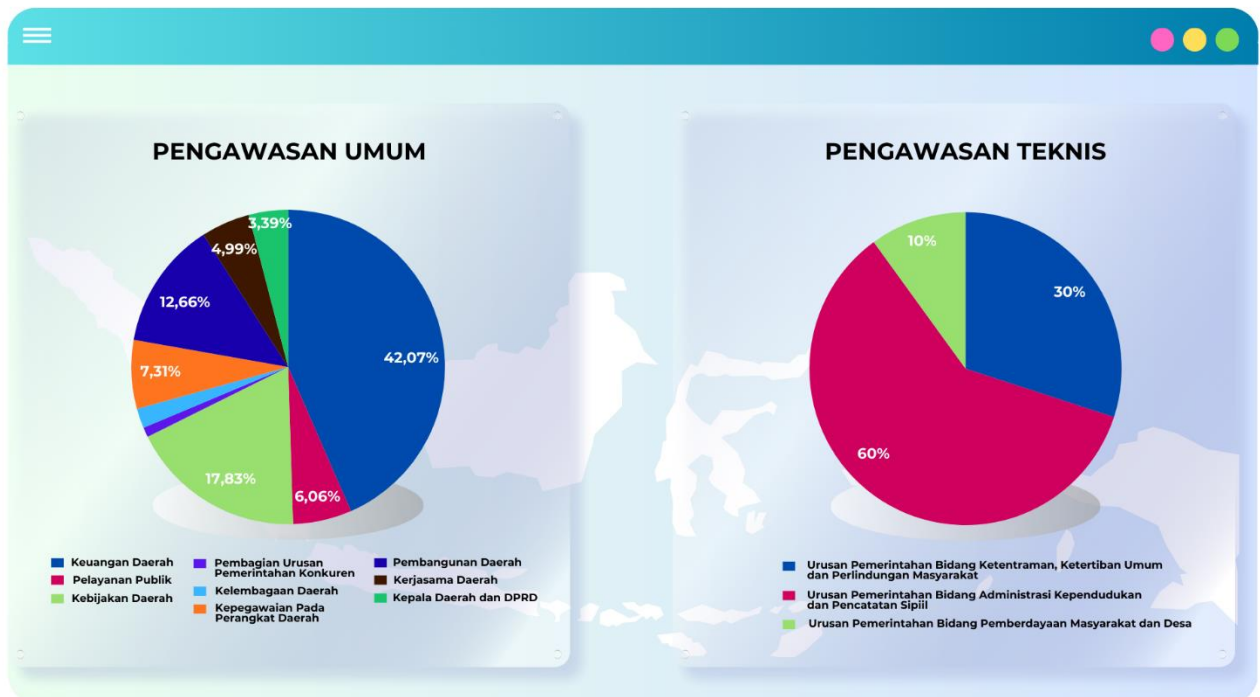
Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan pada **34 Pemerintah Provinsi**, yang mencakup **9 aspek pengawasan umum** dan **3 aspek pengawasan teknis**. Adapun rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pengawasan Umum dan Teknis

No	Aspek Pengawasan	Temuan		Rekomendasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Pengawasan Umum					
1.	Keuangan daerah	236	42,07	442	42,66
2.	Pelayanan publik	34	6,06	58	5,60
3.	Kebijakan daerah	100	17,83	170	16,41
4.	Pembagian urusan pemerintahan konkuren	6	1,07	9	0,87
5.	Kelembagaan daerah	16	2,85	31	2,99
6.	Kepegawaian pada perangkat daerah	41	7,31	54	5,21
7.	Pembangunan daerah	71	12,66	161	15,54
8.	Kerjasama Daerah	28	4,99	60	5,79
9.	Kepala Daerah dan DPRD	19	3,39	35	3,38
Pengawasan Teknis					
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	0,53	4	0,39
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	1,07	11	1,06
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0,18	1	0,10
	Total	561	100	1.036	100

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, per 10 November 2025

Grafik 2
Temuan Aspek Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemerintahan Daerah



a. Hasil Pengawasan Umum dan Teknis

- 1) Hasil pengawasan terdapat **561 temuan** dengan **1.036 rekomendasi**, menggambarkan ruang perbaikan pada tata kelola pemerintahan daerah. Rincian per aspek disajikan sebagai berikut:
 - a) **Aspek Keuangan Daerah** merupakan area paling rawan dengan 236 temuan (42,07%) dan 442 rekomendasi (42,66%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola keuangan daerah masih menjadi isu utama, baik dalam aspek akuntabilitas maupun kepatuhan terhadap regulasi.
 - b) **Aspek Kebijakan Daerah** mencatat 100 temuan (17,83%), yang menunjukkan perlunya penguatan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi agar kebijakan daerah lebih efektif dan tepat sasaran.
 - c) **Aspek Pembangunan Daerah** mencatat 71 temuan (12,66%), yang menunjukkan perlunya penguatan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi guna memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan sesuai target.
 - d) **Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah** mencatat 41 temuan (7,31%). Meskipun porsinya lebih kecil dibandingkan aspek lainnya, temuan ini tetap signifikan karena berkaitan langsung dengan efektivitas birokrasi dan daya dukung SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
 - e) **Aspek Pelayanan Publik** mencatat 34 temuan (6,06%), yang menunjukkan masih adanya ketidakefektifan dalam penyelenggaraan layanan serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - f) **Aspek Pengawasan Teknis** mencatat 10 temuan (1,78%). Meskipun jumlahnya relatif kecil, aspek ini tetap penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan Dukcapil, ketertiban dan ketenteraman umum (Trantibumlinmas), serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis

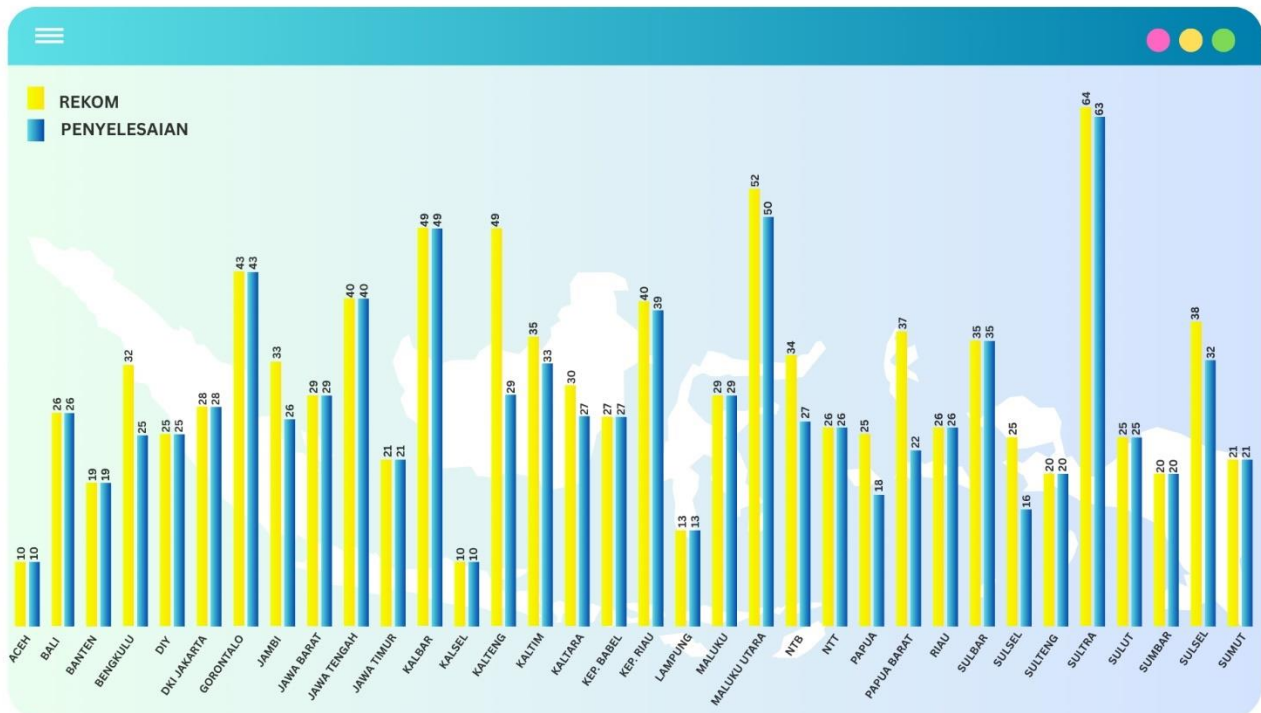
Tabel 3
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis

No	Satker	Temuan Administrasi			Temuan Kerugian Daerah		
		Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan (Rp)	Sudah Disetor (Rp)	Sisa Temuan (Rp)
1	Aceh	10	10	0	0	0	0
2	Bali	26	26	0	0	0	0
3	Banten	19	19	0	0	0	0
4	Bengkulu	32	25	7	0	0	0
5	D.I.Y	25	25	0	0	0	0
6	DKI Jakarta	28	28	0	0	0	0
7	Gorontalo	43	43	0	0	0	0
8	Jambi	33	26	7	0	0	0
9	Jawa Barat	29	29	0	0	0	0
10	Jawa Tengah	40	40	0	0	0	0

No	Satker	Temuan Administrasi			Temuan Kerugian Daerah		
		Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan (Rp)	Sudah Disetor (Rp)	Sisa Temuan (Rp)
11	Jawa Timur	21	21	0	0	0	0
12	Kalbar	49	49	0	35.700.000	35.700.000	0
13	Kalsel	10	10	0	0	0	0
14	Kalteng	49	29	20	4.458.164.939	947.969.543	3.510.195.396
15	Kaltim	35	33	2	0	0	0
16	Kaltara	30	27	3	0	0	0
17	Kep. Babel	27	27	0	0	0	0
18	Kep. Riau	40	39	1	25.232.988	0	25.232.988
19	Lampung	13	13	0	0	0	0
20	Maluku	29	29	0	0	0	0
21	Maluku Utara	52	50	2	46.800.000	0	46.800.000
22	NTB	34	27	7	0	0	0
23	NTT	26	26	0	22.400.000	22.400.000	0
24	Papua	25	18	7	29.722.247.060	0	29.722.247.060
25	Papua Barat	37	22	15	234.933.287	234.933.287	0
26	Riau	26	26	0	0	0	0
27	Sulbar	35	35	0	12.738.503	12.738.503	0
28	Sulsel	25	16	9	236.052.250	171.260.000	64.792.250
29	Sulteng	20	20	0	0	0	0
30	Sultra	64	63	1	18.279.287	18.279.287	0
31	Sulut	25	25	0	0	0	0
32	Sumbar	20	20	0	0	0	0
33	Sumsel	38	32	6	0	0	0
34	Sumut	21	21	0	0	0	0
Total		1036	956	80	34.812.548.313	1.443.280.619	33.369.267.694

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, per 10 November 2025

Grafik 3
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis



Berdasarkan Tabel dan Grafik 3, dari total **1.036 rekomendasi**, telah diselesaikan **956 rekomendasi (92,3%)**, sementara **80 rekomendasi (7,7%)** masih belum ditindaklanjuti. Nilai temuan tercatat sebesar **Rp34,81 miliar**, dengan setoran ke kas negara baru mencapai **Rp1,44 miliar (4,1%)**, sehingga masih terdapat sisa temuan yang signifikan sebesar **Rp33,36 miliar (95,9%)**.



Sebagian besar satker telah mencapai penyelesaian rekomendasi. Namun, terdapat sejumlah daerah berisiko tinggi yang memerlukan perhatian khusus, yaitu **Papua** (sisa Rp29,72 miliar), **Kalteng** (sisa Rp3,51 miliar), **Sulawesi Selatan** (sisa Rp64,8 juta), **Maluku Utara** (sisa Rp46,8 juta), serta **Kepulauan Riau** (sisa Rp25,23 juta).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyelesaian rekomendasi cukup tinggi dari sisi jumlah, **aspek penyelesaian temuan kerugian daerah masih menjadi tantangan utama**. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian terutama pada daerah dengan nilai kerugian besar menjadi prioritas untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

c. Analisis dan Rekomendasi

1) Analisis

- a) **Keuangan Daerah** menjadi aspek paling dominan dengan 42,07% temuan dan 42,66% rekomendasi, menegaskan bahwa tata kelola APBD masih lemah dan memerlukan penguatan yang lebih sistematis.
- b) **Aspek Kebijakan Daerah (17,83%) dan Pembangunan Daerah (12,66%)** menunjukkan masih lemahnya perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah.
- c) **Aspek Kepegawaian (7,31%) dan Pelayanan Publik (6,06%)** menunjukkan masih adanya permasalahan dalam efektivitas birokrasi serta mutu layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat.

- d) **Aspek Pengawasan Teknis (1,78%)**, meskipun porsinya kecil, tetap penting karena terkait langsung dengan layanan Dukcapil, Trantibumlinmas, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.



- e) **Kelemahan struktural dalam tata kelola keuangan daerah** masih terlihat jelas, di mana lemahnya penatausahaan APBD, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan manajemen aset berkontribusi langsung terhadap dominasi temuan pada aspek keuangan.
 - f) **Kapasitas APIP daerah belum merata**, di mana sebagian daerah mampu menyelesaikan 100% tindak lanjut, sementara daerah lainnya masih stagnan pada level 0%. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan pembinaan yang lebih terarah bagi APIP daerah.
 - g) **Pengawasan teknis belum optimal**, karena meskipun memiliki peran yang krusial bagi pelayanan publik, porsinya masih kecil (1,78%) sehingga menunjukkan bahwa penguatan pengawasan teknis belum berjalan secara signifikan.
- 2) Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Kepala Daerah, agar melakukan:
- a) **Perbaikan tata kelola keuangan daerah** perlu dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari perencanaan yang berfokus pada tujuan serta program prioritas yang berorientasi pada *outcome*, dilanjutkan dengan pemantauan pelaksanaan berbasis risiko di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini, memastikan adanya pengendalian yang memadai, serta mendorong tertib administrasi dan pelaporan.

- b) **Percepatan tindak lanjut temuan keuangan daerah** harus menjadi prioritas, dengan mewajibkan pejabat yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan temuan kerugian keuangan daerah melalui penyetoran ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) **Penguatan peran APIP dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Daerah** dengan mendorong APIP berfungsi sebagai *early warning*, *consulting*, dan *quality assurance* guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
- d) **Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi** dilakukan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terukur, dan mudah dilaksanakan, serta memastikan bahwa setiap proses pemerintahan memiliki mekanisme pengendalian dan pelaporan yang terdokumentasi dengan baik.

3. Pengawasan Tematik pada Pemerintahan Daerah

Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan tematik pada **19 Pemerintah Daerah**, dengan cakupan **7 aspek**, yaitu: Pelayanan Publik Manajemen Rumah Sakit, APBD, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Publik, Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan, Audit dengan Tujuan Tertentu, dan Pengawasan Lainnya.



a. Hasil Pengawasan Tematik

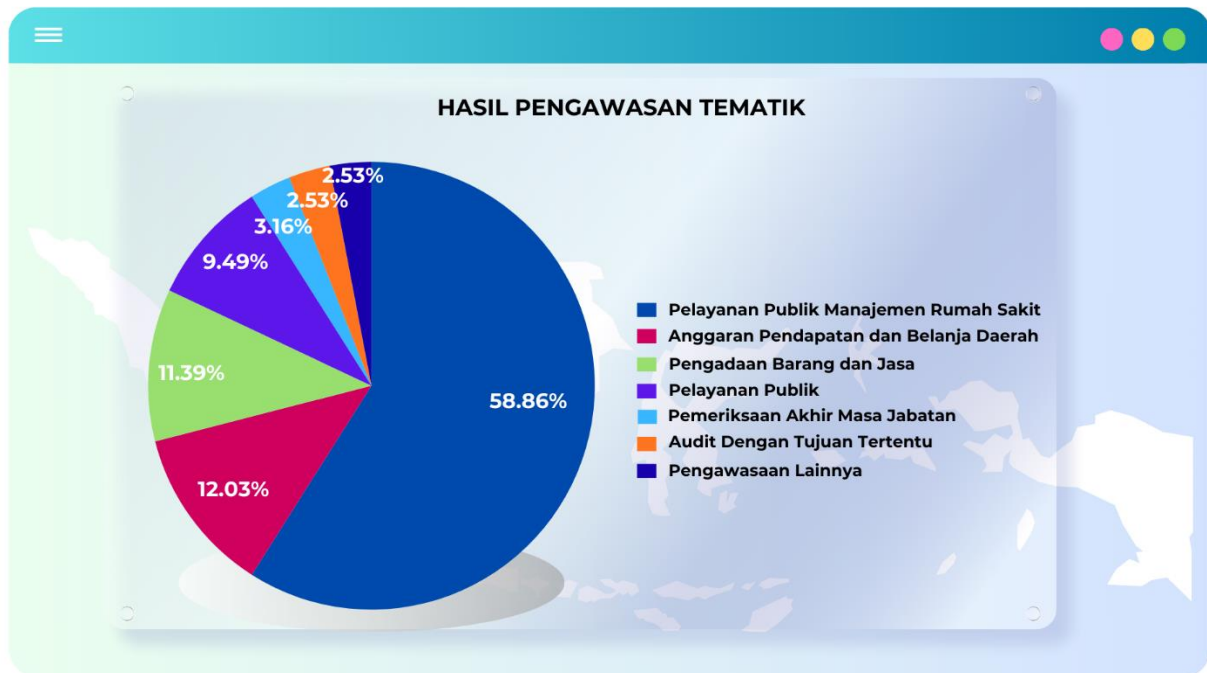
Berdasarkan data pada Aplikasi **SIWASIAT** (per 10 November 2025), tercatat **158 temuan** dan **331 rekomendasi**, dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Pengawasan Tematik

No	Aspek Pengawasan	Temuan		Rekomendasi	
		Jumlah	% Temuan	Jumlah	% Rekom
1.	Pelayanan Publik Manajemen Rumah Sakit	93	58.86%	177	53.47%
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19	12.03%	45	13.60%
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	18	11.39%	39	11.78%
4.	Pelayanan Publik	15	9.49%	37	11.18%
5.	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	5	3.16%	6	1.81%
6.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	4	2.53%	20	6.04%
7.	Pengawasan Lainnya	4	2.53%	7	2.11%
Total		158	100%	331	100%

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, per 10 November 2025

Grafik 4
Temuan Pengawasan Tematik pada Pemerintahan Daerah



Berdasarkan tabel dan grafik 4 di atas, distribusi temuan sebagai berikut:

- 1) **Pelayanan Publik Manajemen Rumah Sakit** mencatat 93 temuan (58,8%) dan 177 rekomendasi (53,5%), menjadikannya aspek dengan jumlah temuan terbesar. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam manajemen rumah sakit daerah, khususnya terkait proses bisnis, mutu layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- 2) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** mencatat 19 temuan (12%) dengan 45 rekomendasi (13,6%), yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa** mencatat 18 temuan dengan 39 rekomendasi (11,8%), yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kepatuhan terhadap prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta penguatan kualitas output kegiatan pengadaan.
- 4) **Pelayanan Publik Umum** mencatat 15 temuan dengan 37 rekomendasi, yang menyoroti masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan dasar, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
- 5) **Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan** mencatat 5 temuan dengan 6 rekomendasi, yang menunjukkan masih adanya aspek-aspek



penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan pembenahan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

- 6) **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** mencatat 4 temuan dengan 20 rekomendasi, yang menunjukkan bahwa setiap temuan memerlukan sejumlah rekomendasi yang spesifik sebagai langkah perbaikan yang harus ditindaklanjuti.
- 7) **Pengawasan Lainnya** mencatat 4 temuan dengan 7 rekomendasi, yang mengindikasikan adanya aspek-aspek pengelolaan tertentu yang tetap memerlukan perhatian dan perbaikan meskipun cakupan temuan relatif kecil.

b. Tindak Lanjut Pengawasan Tematik

Rekap tindak lanjut pada 19 Pemerintah Daerah menunjukkan terdapat 325 rekomendasi, dengan 72 rekomendasi telah diselesaikan (22,20%) dan 253 rekomendasi masih tersisa (77,80%). Nilai temuan tercatat sebesar **Rp704.935.203**, dengan nilai setoran yang telah diselesaikan sebesar **Rp174.735.794** (24,80%), sehingga masih terdapat sisa temuan sebesar **Rp530.199.409** (75,20%). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

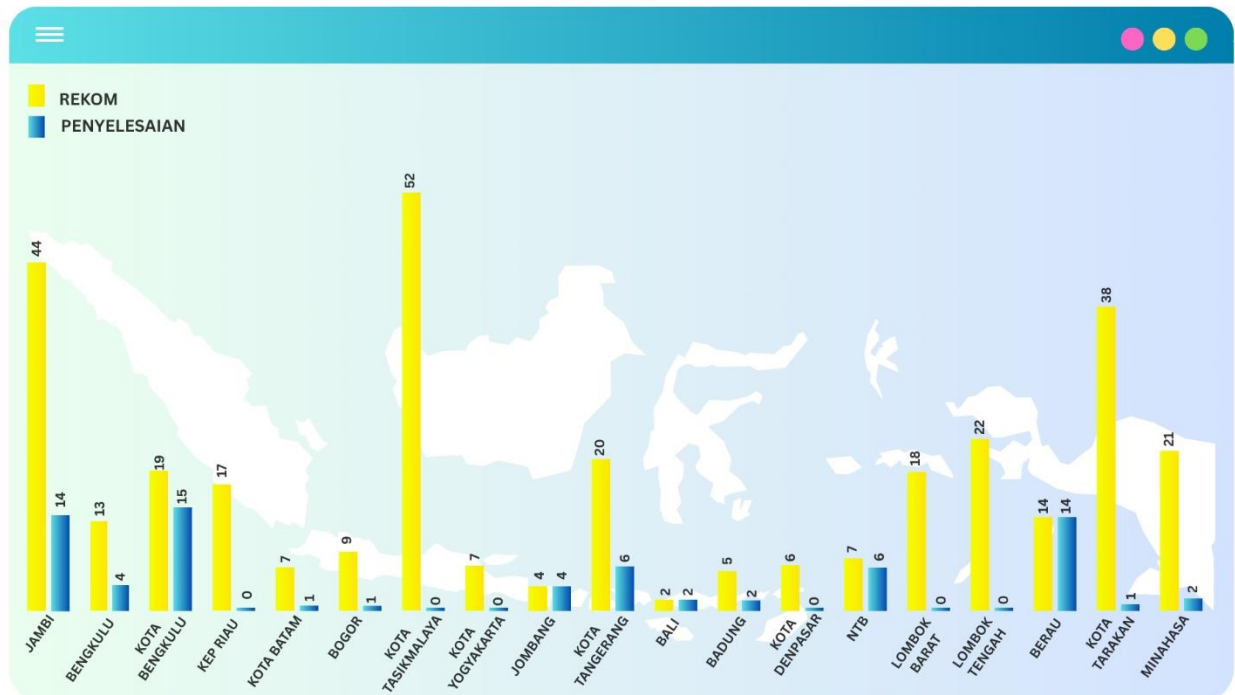
Tabel 5
Tindak Lanjut Pengawasan Tematik

No	Pemerintah Daerah	Temuan Administrasi			Temuan Kerugian Daerah		
		Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan (Rp)	Telah Disetor (Rp)	Sisa Temuan (Rp)
1	Jambi	44	14	30	530.199.409	0	530.199.409
2	Bengkulu	13	4	9	0	0	0
3	Kota Bengkulu	19	15	4	0	0	0
4	Kepulauan Riau	17	0	17	0	0	0
5	Kota Batam	7	1	6	0	0	0
6	Bogor	9	1	8	0	0	0
7	Kota Tasikmalaya	52	0	52	0	0	0
8	Kota Yogyakarta	7	0	7	0	0	0
9	Jombang	4	4	0	0	0	0
10	Kota Tangerang	20	6	14	0	0	0
11	Bali	2	2	0	0	0	0
12	Badung	5	2	3	174.735.794	174.735.794	0
13	Kota Denpasar	6	0	6	0	0	0
14	NTB	7	6	1	0	0	0
15	Lombok Barat	18	0	18	0	0	0
16	Lombok Tengah	22	0	22	0	0	0
17	Berau	14	14	0	0	0	0
18	Kota Tarakan	38	1	37	0	0	0

No	Pemerintah Daerah	Temuan Administrasi			Temuan Kerugian Daerah		
		Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan (Rp)	Telah Disetor (Rp)	Sisa Temuan (Rp)
19	Minahasa	21	2	19	0	0	0
	Total	325	72	253	704.935.203	174.735.794	530.199.409

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, per 10 November 2025

Grafik 5
Tindak Lanjut Pengawasan Tematik



c. Analisis dan Rekomendasi

1) Kesimpulan

- Porsi terbesar temuan berada pada Manajemen Rumah Sakit**, dengan titik rawan yang mencakup kelemahan proses bisnis, kendali mutu, serta kepatuhan terhadap regulasi layanan kesehatan daerah.
- Temuan pada aspek Pengadaan Barang dan Jasa** mengindikasikan bahwa perencanaan, proses pengadaan, dan pemanfaatannya belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik.
- Kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan masih rendah dan timpang**, dengan kesenjangan yang nyata antar daerah—mulai dari 0% hingga 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas APIP serta tingkat komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.



- d) **Temuan kerugian daerah pada Provinsi Jambi memerlukan penanganan khusus**, karena nilai sisa temuan masih besar dan hingga saat ini belum terdapat penyetoran atau pengembalian ke kas daerah.
- e) **Kapasitas dan kompetensi APIP belum merata**, yang terlihat dari perbedaan kemampuan dalam melakukan telaah serta menindaklanjuti rekomendasi secara implementatif di masing-masing daerah.
- f) **Komitmen pimpinan daerah dalam penyelesaian TLHP masih bervariasi**, sangat dipengaruhi oleh arahan kepala daerah serta tingkat dukungan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan.

- g) **Penegakan kepatuhan masih belum tegas**, terlihat dari banyaknya temuan administratif yang tidak ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan *reward* dan *punishment* guna memperkuat kepatuhan dan akuntabilitas di daerah.



- h) **Siklus anggaran turut memperlambat tindak lanjut rekomendasi perbaikan**, karena beberapa langkah penyesuaian memerlukan perubahan alokasi atau proses penganggaran yang hanya dapat dilakukan pada periode tertentu.

2) Rekomendasi

- a) **Percepatan tindak lanjut pada daerah berisiko tinggi** perlu menjadi prioritas, khususnya di Provinsi Jambi yang masih memiliki sisa temuan sebesar **Rp530,19 juta** yang belum ditindaklanjuti.
- b) **Penguatan tata kelola Rumah Sakit** perlu diprioritaskan untuk memastikan perbaikan proses bisnis, peningkatan mutu layanan, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi pelayanan kesehatan daerah.
- c) **Penguatan kepatuhan terhadap regulasi terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan** perlu ditegaskan, dengan memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima, sebagaimana diatur dalam **PP Nomor 12 Tahun 2017**.
- d) **Optimalisasi pengawasan internal** diperlukan agar APIP daerah lebih proaktif dalam mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi, sekaligus memastikan pengendalian internal berjalan efektif di seluruh tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Secara umum, hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan, baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah, masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Temuan terbesar berasal dari aspek pengelolaan keuangan daerah dan manajemen layanan publik, khususnya layanan rumah sakit, yang mencerminkan perlunya penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, kepatuhan regulasi, serta efektivitas pelayanan publik.

Pada level daerah, kesenjangan kapasitas dan komitmen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi masih sangat nyata terlihat dari variasi capaian penyelesaian mulai dari 0% hingga 100%. Daerah dengan nilai kerugian besar, seperti Papua dan Kalimantan Tengah, membutuhkan intervensi lebih terstruktur. Sementara itu, lemahnya Sistem Pengendalian Internal, disparitas kompetensi SDM pengelola keuangan dan perencanaan, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya berorientasi kepatuhan menjadi penyebab utama berulangnya temuan administrasi dan pengendalian. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, pembenahan tata kelola keuangan, serta peningkatan kepatuhan dan integritas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

2. Rekomendasi

- a. Mempercepat penyelesaian rekomendasi pada daerah berisiko tinggi, khususnya di Papua dan Kalimantan Tengah, dengan memastikan pengembalian kerugian daerah dengan menyetorkan ke kas daerah.
- b. Memperkuat tata kelola Rumah Sakit Daerah, melalui perbaikan proses bisnis, peningkatan mutu layanan, serta kepatuhan terhadap regulasi layanan kesehatan.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi tindak lanjut hasil pengawasan, dengan memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2017 dan memaksimalkan monitoring melalui aplikasi SIWASIAT.
- d. Mengoptimalkan peran APIP daerah, sebagai *early warning system*, *consulting*, dan *quality assurance*.
- e. Mendorong penyusunan dan penerapan SOP yang jelas dan terukur pada seluruh proses pemerintahan.
- f. Meningkatkan kapasitas SDM khususnya pada bidang keuangan, pengadaan, dan perencanaan agar proses bisnis pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga mengurangi risiko berulangnya temuan yang sama.
- g. Memperkuat penegakan kepatuhan melalui penerapan *reward and punishment* yang konsisten kepada Satuan Kerja yang responsif maupun yang lalai dalam penyelesaian rekomendasi.

TIM PENYUSUN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN TAHUN 2025

MAHARINA DESIMARIA

INDAH EKARISTI

AULIA RAFNI RAHMAWATI

SEPTIA MENTARI

CINDY OLGA

YOHANES RAHERADI

JENIUS HAKIM SIMANJUNTAK

CHATARINA DE RICCI R. MAMULAK

VALENTINO PARTOGI SIAGIAN

HUDA MUHAMMAD FAJAR

INDAH JESWITA RIZKIA PUTRI

ADITYA DANISWARA HARIMAN

IRFAN HILMI

APRILIA SETIAWATI

VISTA EFANNY FILLAYATA

RAFI NAUFAL AKBAR

DIAH TRIAYU LARASWATI

ANGELITA VALENTINA SINAGA

REGA D NUGRAHA

JIDAN HAFIDZ F



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jalan Medan Merdeka Timur No. 8 Jakarta Pusat 10110
Telp. [021] 3846391 Fax. [021] 3849422
Website : www.itjen.kemendagri.go.id